

ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DENGAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY* PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2014-2017

Sutri Handayani¹

¹Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

Email: sutrihandayani99@gmail.com

ABSTRAK

Penilaian *value for money* yaitu inti dari suatu pengukuran kinerja pada suatu pemerintah sektor publik. Pengolahan dari suatu organisasi sektor publik yang berdasar dari tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisien, dan efektivitas guna untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui suatu kinerja dari pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2014-2017. Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dan sampelnya adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2014-2017 yang di ambil melalui website Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan (BPKAD). Teknik analisis yang digunakan adalah menggunakan konsep *value for money*, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi aspek Ekonomis kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan di tahun 2014-2017 berada pada kriteria ekonomis, yakni sebesar 93,26%. Hal ini dikarenakan realisasi pengeluaran belanja pemerintah lebih kecil dari pada anggaran yang dibelanjakan. Dari segi aspek Efisien jika dilihat dalam empat tahun, yakni tahun 2014-2017, rata-rata rasio efisien dapat disimpulkan sangat efisien, yakni mencapai 99,76%. Hal ini dikarenakan anggaran pengeluaran belanja pemerintah tidak melebihi dari anggaran pendapatan yang didapatkan. Dan dari segi aspek Efektivitas secara keseluruhan dalam empat tahun 2014-2017 kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa dikatakan tidak efektif, yakni hanya sebesar 97,99%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan pemerintah lebih kecil dari pada anggaran pendapatan atau target pendapatan. Kata kunci: Kinerja, Value For Money, Efisiensi, Efektifitas.

ABSTRACT

Value for money assessment is the core of a performance measurement in a public sector government. Processing of a public sector organization based on three main elements, namely: economic, efficient, and effectiveness in order to achieve better regional financial management performance. The purpose of this research is to find out a performance of the financial management of the Lamongan District Government in 2014-2017. In this research the approach taken is through a qualitative approach. The population in this study were all financial statements of the Lamongan District Government and the sample was the Realization of the Lamongan District Revenue Budget (APBD) for 2014-2017 taken through the website of the Lamongan Regency Financial and Asset Management Agency (BPKAD). The analysis technique used is to use the concept of value for money, namely economical, efficiency, and effectiveness. The results of this study indicate that in terms of economic aspects the financial management performance of the Lamongan District Government in 2014-2017 is in the economic criteria, which is 93.26%. This is because the realization of government spending is smaller than the budget spent. In terms of efficiency, when viewed in four years, that is 2014-2017, the average efficient ratio can be concluded to be very efficient, reaching 99.76%. This is because the government expenditure budget does not exceed the revenue budget obtained. And in terms of aspects of overall effectiveness in the four years 2014-2017 the financial management performance of the Lamongan District Government can be said to be ineffective, which is only 97.99%. This is because the realization of government revenue is smaller than the revenue budget or revenue target. Kata kunci: Performance, Value For Money, Efficiency, Effectiveness.



PENDAHULUAN

Dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak terhadap pelaksanaan *Good Governance* maka pengukuran kinerja merupakan salah satu instrument penting untuk mewujudkannya, dan juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Namun pada era reformasi ini, fenomena pengukuran keberhasilan hanya menekankan pada *input*. Padahal tingkat keberhasilan harus diukur tidak semata-mata kepada *input* dari program instansi tetapi lebih ditekankan pada keluaran atau manfaat dari program instansi tersebut bagi kesejahteraan masyarakat.

Mardiasmo, (2017:4). *Value For Money* merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam menjalankan aktivitasnya, dimana hal ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai kinerja suatu pemerintah daerah melalui perhitungan dan analisis terhadap pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-nya (APBD), bukan hanya dari sisi *input*, tetapi dari sisi *output*, *impact* dan *benefit*-nya. Dimana *Value For Money* sebagai konsep pengelolaan keuangan ini berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:

- 1) Ekonomi, yang terkait dengan sejauh mana organisasi sector publik dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan untuk menghindari pengeluaran yang boros.
- 2) Efisiensi, merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu.
- 3) Efektivitas, yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, atau secara sederhana merupakan perbandingan outcome dengan output.

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi *Value For Money* yang benar adalah, Mardiasmo (2017:7):

1. Meningkatnya efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatnya mutu pelayanan publik.

3. Menurunnya biaya pelayanan publik kinerja, inefisiensi, dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatnya kesadaran akan uang publik (*public cost awarerness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

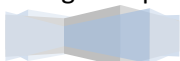
Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan tersebut sebagai suatu pencapaian kinerja pemerintah, maka sangat dibutuhkan adanya indikator yang jelas oleh *stakeholder*. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Mardiasmo (2017:130-131). Indikator kinerja berperan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Hal ini tidak berarti bahwa suatu indikator akan memberikan ukuran pencapaian program yang definitif. Indikator *Value For Money* terdiri dari dua bagian, yaitu: indikator alokasi biaya mencakup ekonomi dan efisiensi serta indikator kualitas pelayanan yang mencakup efektifitas.

Indikator kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Pihak internal dapat menggunakannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kuantitas serta efisiensi biaya. Sedangkan pihak eksternal dapat menggunakan indikator kinerja sebagai control dan sekaligus sebagai informasi dalam rangka mengukur tingkat akuntabilitas publik.

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui tingkat ekonomis terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Lamongan selama tahun 2014-2017; Untuk mengetahui tingkat efisien terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Lamongan selama tahun 2014-2017; dan Untuk mengetahui tingkat efektivitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Lamongan selama tahun 2014-2017.

METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2013:2) Kualitatif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi



tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran APBD Pemerintah Kabupaten Lamongan.

a. Populasi

Populasi adalah semua anggota kelompok dapat berupa orang, kejadian atau barang yang akan menjadi obyek penelitian. Populasi merupakan seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam penelitian. (Sumanto, 2014:159). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti, atau sebagian anggota populasi yang dipilih menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010:15). Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sampel data laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamongan tahun 2014-2017 yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan periode 2014-2017.

Metode analisis data yang digunakan untuk pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Lamongan berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan metode *value for money* untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Tahapan analisis yang digunakan antara lain:

1. Identifikasi elemen-elemen APBD yang meliputi realisasi pengeluaran, anggaran pengeluaran, realisasi belanja, dan realisasi pendapatan.
2. Pengukuran elemen-elemen dalam *value for money*.

Mahsun (2009:186-188) berikut ini adalah Langkah-Langkah Pengukuran *value for money*:

a. Pengukuran ekonomi

Ekonomis dalam hal ini adalah hubungan antara pasar dan *input* dimana barang dan jasa dibeli pada kualitas yang diinginkan pada harga terbaik yang dimungkinkan. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila rasio yang dicapai sangat dari seratus persen. Berikut cara untuk mengukur tingkat ekonomi:

Ekonomis

$$= \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Anggaran biaya untuk memperoleh pendapatan}} \times 100$$

Kriteria ekonomi adalah :

- 1) Jika nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis.

b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila rasio yang dicapai sangat dari seratus persen. Berikut ini adalah cara untuk mengukur tingkat efisiensi:

Efisiensi

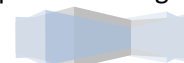
$$= \frac{\text{Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan}}{\text{Realisasi pendapatan}} \times 100$$

Kriteria efisien adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisien berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien.

c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Dimana efektivitas merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan daerah dalam



menjalankan tugasnya dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dicapai sebesar satu atau seratus persen. Berikut cara untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100$$

Kriteria efektivitas adalah :

- 1) Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti tidak efektif.
- 2) Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efektivitas berimbang.
- 3) Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dengan menggunakan analisis *value for money* terhadap realisasi APBD tahun 2014 sampai dengan 2017.

a. Hasil dari tingkat ekonomis terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama 2014-2017.

Diketahui bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam empat tahun terakhir (2014-2017) menghasilkan rata-rata rasio yang ekonomis karena hasil perhitungannya sebesar 92,26% tidak lebih dari kriteria ekonomis yaitu 100%. Rasio pada tahun 2014 sebesar 93,09%, tahun 2015 sebesar 93,00%, tahun 2016 sebesar 90,91%, tahun 2017 sebesar 96,05%. Sehingga dapat disimpulkan dari perhitungan empat tahun terakhir kinerja pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kabupaten Lamongan dilihat dari kriteria tingkat ekonomisnya, bisa dikatakan sangat ekonomis.

b. Hasil dari tingkat efisien terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama 2014-2017.

Diketahui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam empat tahun terakhir (2011-2014) menghasilkan rata-rata rasio yang sangat efisien, karena hasil perhitungannya sebesar 99,76% tidak lebih dari 100%. Pada tahun 2014 yakni sebesar 97,02%, di tahun 2015 sebesar 98,74%. Sedangkan di

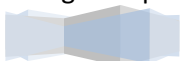
tahun 2016 naik sebesar 4,03% menjadi 102,77%, yang semula di tahun 2015 sebesar 98,74%. Hal ini dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan, sehingga di tahun 2016 bisa dikatakan tidak efisien. Sementara di tahun 2017 turun sebesar 2,28% menjadi 100,49% dari tahun yang sebelumnya mencapai 102,77% di tahun 2016. Hal ini juga dikarenakan realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi anggaran pendapatan. Sehingga di tahun 2017 juga bisa dikatakan tidak efisien. Di dalam empat tahun, yakni tahun 2014-2017. Di tahun 2015 pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan bisa dikatakan kinerja yang paling efisien. Namun jika dilihat dalam empat tahun 2014-2017 rata-rata rasio efisien dapat disimpulkan sangat efisien, karena dalam empat tahun 2014-2017 rasio tingkat efisien yakni mencapai 99,76%.

c. Hasil dari tingkat efektivitas terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama 2014-2017.

Diketahui bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan dalam empat tahun (2014-2017) menghasilkan rata-rata rasio yang tidak efektif. Karena hasil rata-rata perhitungannya di tahun 2014-2017 hanya mencapai 97,99%, yakni tidak mencapai sama dengan 100% atau lebih dari 100%. Pada tahun 2014 sebesar 101,18%, tahun 2015 sebesar 100,28% sehingga dikatakan efektif, sedangkan di tahun 2016-2017 tidak efektif. Di tahun 2016 turun sebesar 7,47%, yakni sebesar 92,81%. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Dan di tahun 2017 meningkat 4,89% menjadi 97,99%. Hal ini juga dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari pada anggaran pendapatan. Jadi secara keseluruhan dalam empat tahun (2014-2017) kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Lamongan bisa dikatakan tidak efektif, karena prosentase perhitungannya kurang dari satu atau 100%, yakni hanya sebesar 97,99%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan



selama empat tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

1. Dari segi aspek Ekonomis kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan di tahun 2014-2017 berada pada kriteria ekonomis. Hal ini dikarenakan berdasarkan perhitungan yang saya lakukan selama 4 tahun 2014-2017 pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata yakni sebesar 93,26%, dalam hal ini sesuai dengan kriteria ekonomis itu sendiri apabila rata-rata ekonomis kurang dari 100% maka bisa dikatakan pengukuran kinerja selama 4 tahun sangat ekonomis, dan selain itu juga pemerintah mampu mengukur realisasi pengeluaran belanja lebih kecil dari pada anggaran yang dibelanjakan sehingga menjadi lebih hemat.
2. Sedangkan dari segi aspek Efisien jika dilihat dalam empat tahun, yakni tahun 2014-2017, rata-rata rasio efisien dapat disimpulkan sangat efisien. Hal ini dikarenakan berdasarkan perhitungan yang saya lakukan selama 4 tahun 2014-2017 pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata yakni sebesar 99,76%, dalam hal ini sesuai dengan kriteria efisien itu sendiri apabila rata-rata efisien kurang dari 100% maka bisa dikatakan pengukuran kinerja selama 4 tahun sangat efisien, dan anggaran pengeluaran belanja pemerintah tidak melebihi dari anggaran pendapatan yang didapatkan oleh pemerintah.
3. Dan dari segi aspek Efektivitas secara keseluruhan dalam empat tahun 2014-2017 kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan bisa dikatakan tidak efektif, Karena berdasarkan perhitungan yang saya lakukan selama 4 tahun 2014-2017 pengukuran kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memiliki rata-rata yakni sebesar 97,99%, dalam hal ini sesuai dengan kriteria efektivitas itu sendiri apabila rata-rata efektivitas lebih dari 100% maka baru bisa dikatakan efektif, sedangkan dalam 4 tahun ini hanya sebesar 97,99% maka dikatakan pengukuran kinerja pengelolaan keuangan pemerintah selama 4

tahun 2014-2017 tidak efektif karena tidak sesuai dengan kriteria efektivitas itu sendiri, dan hal ini juga dikarenakan realisasi pendapatan lebih kecil dari pada anggaran pendapatan atau target pendapatan.

Jadi bisa disimpulkan bahwa kinerja laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan selama 4 tahun (2014-2017), bisa dikatakan Ekonomis, Efisien, dan Tidak Efektif.

REKOMENDASI

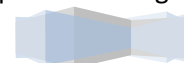
Saran yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan tingkat ekonomis dan meningkatkan tingkat efisien serta memperbaiki tingkat efektivitas dalam mengelola keuangannya. Apabila Pemerintah Kabupaten lamongan belum menerapkan konsep *value for money*, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat mempertimbangkan penerapan konsep tersebut dalam pengelolaan keuangannya, karena hal tersebut dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif, sehingga dapat meningkatkan terealisasinya tujuan yang diharapkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Untuk mencegah terjadinya rasio yang tidak ekonomis, efisien, dan efektif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan harus meningkatkan pengawasan dan pengendalian kepada setiap unit kerja dalam merealisasikan anggaran belanja demi terwujudnya pemerintah yang *good governance*.

2. Bagi peneliti selanjutnya,

Diharapkan metode yang digunakan tidak hanya metode *value for money* saja, tetapi juga *balanced scorecard (BSC)*. Jadi untuk penelitian pengukuran kinerja pengelolaan keuangan selanjutnya sebaiknya dikembangkan menggunakan metode *Balance scorecard*, karena metode ini merupakan alat untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, operasi bisnis internal dan aspek tumbuh kembang.



DAFTAR PUSTAKA

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Mardiasmo. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi. Yogyakarta

Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Jaya Grafindo Persada, Jakarta

Moh. Mahsun. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*, BPFE-Yogyakarta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. CV. Alfabeta, Bandung.

Sumanto. 2014. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Caps Publishing.

